

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kebutuhan informasi dan semakin terbatasnya waktu bagi seorang pimpinan dalam mengambil keputusan membuat pimpinan harus lebih baik dalam memanajemen waktunya. Terlebih jika pimpinan dihadapkan pada waktu singkat agar memilih pejabat struktural yang tepat dan sesuai dengan jabatannya. Pengambilan keputusan untuk setiap permasalahan akan membawa pengaruh yang besar dalam kehidupan masyarakat dan citra pemerintah di mata masyarakat.

Menemukan pejabat struktural yang tepat dan dapat menampung aspirasi masyarakat serta mewujudkannya dalam suatu hasil yang nyata tidak mudah. Dalam menentukan pejabat struktural yang diharapkan dapat memenuhi kualifikasi pada setiap jabatan struktural, telah dibuat suatu prosedur yang tertuang baik dalam Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku. Walaupun ada prosedur yang sistematis, keputusan pemilihan pejabat struktural diharapkan obyektif, tidak memihak, serta transparan agar kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang diperoleh dapat sesuai dengan harapan sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

Selama ini pemilihan pejabat struktural pada Direktorat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Ditjen PHPL, KLHK) dilakukan secara manual yaitu menggunakan teknik pengumpulan dokumen kandidat kemudian diseleksi satu persatu dokumen tersebut kemudian dilakukan perhitungan kriteria secara manual tanpa menggunakan sistem.

Sistem Pendukung Keputusan (SPK) dapat membantu pimpinan dalam membuat keputusan pemilihan pejabat struktural. Banyak metode yang dapat digunakan dalam menentukan kriteria, diantaranya adalah *Analytic Hierarchy Process (AHP)*. AHP merupakan suatu model pendukung keputusan yang akan

menguraikan masalah multi faktor atau multi kriteria yang kompleks menjadi suatu hirarki. Dengan hirarki, suatu masalah yang kompleks dapat diuraikan ke dalam kelompok-kelompoknya yang kemudian diatur menjadi suatu bentuk hirarki sehingga permasalahan akan tampak lebih terstruktur dan sistematis. Setelah kriteria dapat dijabarkan, maka penentuan *grading* akan dilakukan dengan metode FES (*Factor Evaluation System*).

Berdasarkan hal tersebut di atas, melatarbelakangi untuk merancang dan membangun sebuah SPK sebagai alat yang dapat memberikan kemudahan dan efektifitas dalam pengolahan data dalam menentukan keputusan sehingga dapat membantu dalam memberikan keputusan dengan hasil maksimal dan menghindari subyektifitas. Penulis melakukan penelitian ini dengan judul Pemilihan Pejabat Struktural di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Menggunakan Metode *Analytic Hierarchy Process* (AHP) dan *Factor Evaluation System* (FES).

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana untuk mendapatkan pejabat struktural Eselon III dan Eselon IV yang memiliki kompetensi dalam bidangnya dan memiliki kompetensi manajerial dalam memimpin?
2. Bagaimana membangun sebuah Sistem Pendukung Keputusan agar pemilihan pejabat struktural objektif, tidak memihak serta transparan?
3. Bagaimana membangun aplikasi untuk membantu pimpinan dalam membuat keputusan?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dilakukan penelitian ini antara lain :

1. Menerapkan metode AHP untuk penentuan kriteria dan FES untuk *grading* nilai AHP pada pemilihan pejabat struktural.
2. Membuat SPK Pemilihan Pejabat Struktural dengan AHP dan FES pada Ditjen PHPL, KLHK.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian antara lain:

1. Menyediakan aplikasi untuk memudahkan pimpinan (Direktur Jenderal) dalam mengambil keputusan memilih pejabat struktural sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Membantu pengambilan keputusan agar lebih obyektif, tidak memihak, serta transparan agar kualitas SDM yang diperoleh dapat sesuai dengan harapan sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

### **1.5 Pembatasan Masalah**

Penelitian ini akan dibatasi sebagai berikut :

1. SPK ini dilakukan untuk Pemilihan Pejabat Eselon III dan Eselon IV
2. Pengukuran kriteria menggunakan AHP
3. SPK ini akan menghasilkan sistem *grading* menggunakan FES
4. Keluaran dari SPK ini berupa nama pejabat yang memenuhi kriteria atau tidak memenuhi untuk mengisi formasi eselon III dan eselon IV
5. SPK ini digunakan untuk Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

## **1.6 Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara :

### 1. Survey

Pengumpulan data dengan cara survey dilakukan dua cara yaitu :

#### a. Observasi

Pengumpulan data dengan melakukan pengamatan terhadap proses bisnis yang telah dilaksanakan pada Ditjen PHPL, KLHK secara langsung. Data yang didapatkan dari metode observasi ini berupa prosedur pemilihan pejabat yang telah berjalan.

#### c. Wawancara

Wawancara adalah cara pengumpulan data yang dilakukan dengan bertatap muka langsung atau tidak langsung dengan melakukan tanya jawab dengan responden. Pengumpulan data dengan melakukan wawancara kepada pejabat struktural yang menangani masalah kepegawaian dan mutasi pegawai.

### 2. Studi Pustaka

Pengumpulan data menggunakan studi pustaka melalui literatur buku-buku, jurnal, dan media internet.